

# **RENCANA KERJA**

## **ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

### **(RENJA OPD)**



**SEKRETARIAT DPRD**  
**KABUPATEN BOVEN DIGOEL**  
**TAHUN 2018**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas karuniaNya yang tak terhingga sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018 ini dapat disusun sesuai jadwal yang ditentukan.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2021. Adapun penyusunan Renja OPD secara rinci mengacu pada PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2018 ini mengacu pada kebijakan prioritas pembangunan tahun 2018 sebagai pedoman bagi SKPD dalam penentuan program dan kegiatan tahun 2018. Hal ini adalah upaya yang dilakukan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2021.

Harapan kami semoga Renja Sekretariat DPRD ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif dan akuntabel serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Tanah Merah, April 2017

**SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,**

**Drs. INNOCENTIUS TETHOOL**  
Pembina Utama  
NIP. 19581023 199202 1 002

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah perubahan yang berproses menuju ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terancang dan terencana. Paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahan-perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, diperlukan suatu perencanaan yang matang dan terpadu atau terintegrasi. Perencanaan pembangunan ini dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada serta memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan lengkap, namun tetap berpegang pada azas prioritas.

Secara umum rancangan perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.

Rancangan perencanaan juga dilakukan untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap SKPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-SKPD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Renstra-SKPD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran Renstra-SKPD tersebut, maka SKPD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Renja-SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renja-SKPD) disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Renstra-SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Renja DPRD) Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan pada Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel periode 2018 yang memuat rencana arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Boven Digoel yang berkaitan dengan kesekretariatan DPRD dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesekretariatan DPRD .

Dalam rangka upaya mencapai target sasaran pembangunan yang telah diamanatkan di dalam perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang tahun 2005 – 2025 (RPJPD), tentunya diperlukan perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Untuk itu Sekretariat DPRD harus mampu mengambil peran secara optimal di dalam menentukan arah dan kebijakan perencanaan pembangunan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD sejalan dengan sasaran pembangunan baik Provinsi maupun Nasional melalui membangun suatu sistem rancangan perencanaan yang partisipatif, implementatif dan terintegrasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Renja Sekretariat DPRD guna mencapai sasaran.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boven Digoel;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor .... Tahun 2016 tentang RPJMD 2016-2021.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018 dimaksudkan untuk :

1. Memberikan rencana arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka kegiatan kesekretariatan dan pelayanan kedewanan, sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2018 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD tahun 2018.
2. Sebagai rencana dalam memfasilitasi kegiatan pelaksanaan tugas dan wewenang kedewanan.
3. Sebagai sarana mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2018.
4. Merupakan rencana pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD .

#### **1.3.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Sekretariat DPRD di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mulai dari awal perencanaan.
2. Mewujudkan pelayanan tugas dan wewenang kedewanan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan.



3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah dalam bentuk rancangan rencana kerja.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang kedewanan.

### **1.3.3. Sistematika Rancangan Renja**

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2018 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Renja

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- 2.4. Revisi Terhadap Rancangan Awal OPD
- 2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, dan propinsi
- 3.2. Tujuan dan sasaran rancangan renja OPD
- 3.3. Program dan kegiatan

#### **BAB IV PENUTUP**

## BAB II

### EVALUAS PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra OPD

Berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel yang mempunyai tugas, pokok, fungsi dan urusan dalam melaksanakan pelayanan kesekretariatan terhadap DPRD, maka visi Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel tahun 2016 - 2021 adalah **“SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOVEN DIGOEL YANG PROFESIONAL GUNA MENUNJANG SINERGITAS DPRD DAN PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL “**, oleh karena itu Sekretariat DPRD selaku institusi pelayanan kegiatan DPRD di lingkup Pemerintah Kabupaten Boven Digoel harus mampu menjadi institusi pelayanan yang profesional, netral dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya fungsi anggaran DPRD
- Meningkatnya fungsi pengawasan DPRD
- Meningkatnya fungsi legislasi DPRD

Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, hal itu telah direalisasikan dalam 6 program dan 49 kegiatan pada tahun 2016. Adapun beberapa pencapaian kinerja program/kegiatan tersebut sebesar 83,38%. Faktor – faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja antara lain :

- a. Pelaksanaan tahun anggaran 2016 dimulai pada bulan maret 2016
- b. Pergantian Kepala Daerah yang memunculkan persepsi kebijakan baru
- c. Evaluasi dan rasionalisasi beberapa progam/kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan.

Untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target seperti tersebut diatas, maka perlu dibuat kebijakan atau tindakan-tindakan antara lain :

- a. Koordinasi pada internal Sekretariat DPRD perlu ditingkatkan terutama pemahaman tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja
- b. Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun SKPD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan DPRD
- c. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai.
- d. Sinkronisasi dan koordinasi dengan pihak terkait dapat dilakukan secara intensif, sebagai upaya memperoleh data dan informasi yang update untuk meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat.

## **2.2 Analisa kinerja pelayanan Sekretariat DPRD**

Sesungguhnya Pelayanan dan fasilitasi kedewanan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan – pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam meningkatkan pelayanan dan fasilitasi DPRD di masa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan dan fasilitasi kedewanan sangat bergantung dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (bottom-up) maupun dari tingkat atas (top-down), sehingga peran serta masyarakat (stakeholders) sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yang lebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel tahun 2016, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan jaring aspirasi masyarakat yang aktif dan efektif;

- Mewujudkan masyarakat yang sadar dan tertib hukum;
- Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD.

### 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2016 dari target/sasaran sebesar 83,58% rata rata selama 1 tahun anggaran yang artinya pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan program didalam anggaran (APBD) dan nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja, Hal itu menunjukkan bahwa penyerapan yang cukup baik.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD selama Tahun 2016 adalah :

1. Kurangnya aparatur pelaksana dalam rangka memahami perubahan aturan terbaru
2. Lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar bagian
3. Kurang disiplinnya aparatur Sekretariat DPRD
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan dari kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang kurang penting.
5. Keterbatasan pegawai dilingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel, sehingga pelaksanaan program/kegiatan menjadi kurang maksimal
6. Perubahan visi dan isi Kepala Daerah yang secara langsung maupun tidak langsung merubah arah kebijakan pembangunan sehingga memerlukan penyesuaian kembali terhadap program dan kegiatan OPD.

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD tahun 2016 merupakan upaya – upaya dalam mencapai visi dan misi RPJMD 2016 – 2021 yaitu **“TERWUJUDNYA KABUPATEN BOVEN DIGOEL SEBAGAI KAWASAN SENTRA PRODUKSI PERTANIAN YANG AMAN, DAMAI, ADIL, BERSATU, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”**.

Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya dampak terhadap visi dan misi kepala daerah yang telah tertuang didalam RPJMD 2016 – 2021, yaitu

1. Adanya keterlambatan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan terutama pada triwulan pertama tahun 2016.
2. Baru tersusunnya RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 – 2021 yang selesai tersusun pada Bulan November 2016 sehingga target pencapaian sasaran pembangunan (pelayanan dan fasilitasi kedewanan ) yang ada di dalam RPJMD Kabupaten Boven Digoel belum dapat diukur sebagaimana mestinya.

Tantangan dan peluang serta isu – isu strategis yang digunakan sebagai rekomendasi/catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setuju di dalam pelaksanaan APBD tahun 2016, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan - peraturan Perundang - undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam

mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel pada tahun 2018, merupakan hasil dari proses perencanaan yang terukur sesuai kebutuhan (musrenbangdes) sampai dengan tingkat kabupaten (musrenbang kabupaten), yang berdoman pada RPJMD Kabupaten Boven Digoel tahun 2016-2021 yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu – isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun renja SKPD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum SKPD dan juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016, maka ditetapkan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel tahun 2018.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum didalam visi RPJMN Tahun 2015-2019, yaitu **INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR**, dengan 8 Misi yaitu :

- 1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
- 2) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan membangun sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju; mere-formasi bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah, menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
- 3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengem-

bangun media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan membenahi struktur hukum, meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

- 4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu dengan membangun kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melampaui kekuatan esensial minimum dan disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.
- 5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
- 6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari dengan memperbaiki pengelolaan pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan; serta



meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan.

- 7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.
- 8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional dengan memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia dalam pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga di berbagai bidang.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada tiga masalah pokok, yakni: (1) merosotnya kewibawaan negara; (2) melemahnya sendisendi perekonomian nasional; dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Tantangan utama pembangunan dapat dikelompokkan atas: (1) dalam rangka meningkatkan wibawa negara, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi; (2) dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan; (3) dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesenjangan antarwilayah, dan percepatan pembangunan kelautan .

Berdasarkan visi dan misi serta agenda pembangunan nasional tersebut pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen

masyarakat di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipatif aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk mewujudkan tercapainya Indonesia maju, mandiri dan adil. Hal tersebut juga dapat didukung melalui strategi dan kebijakan kunci yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat.

## **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD**

### **3.2.1 Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dari Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi layanan terhadap realisasi program kerja DPRD dan tindak lanjutnya.
- 2) Menciptakan hubungan yang harmonis dan demokratis antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten guna mewujudkan visi dan misi bupati dan wakil bupati.
- 3) Meningkatkan kedisiplinan dan kinerja aparatur Sekretariat DPRD yang berkualitas dan profesional.

### **3.2.2 Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renja ini adalah :

- 1) Terciptanya kinerja DPRD yang lebih berkualitas.
- 2) Terlaksananya fungsi pengawasan, penganggaran dan pembentukan regulasi lokal guna menjamin Kabupaten Boven Digoel sebagai kawasan sentra produksi pertanian yang aman, damai, adil, bersatu, sejahtera dan berdaya saing dalam bingkai NKRI.
- 3) Sasaran yang ingin dicapai melalui misi ketiga ini adalah Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel.

### 3.3 Program dan Kegiatan

#### 3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah

Pergantian kepala daerah yang baru dilantik pada bulan april 2016, maka wajib bagi semua OPD mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang baru melalui penjabaran visi dan misi RPJMD Kabupaten Boven Digoel 2016-2021. Berkenaan dengan hal tersebut maka DPRD Kabupaten Boven Digoel sesuai dengan fungsinya akan mengawal jalannya roda pemerintahan seiring dengan kebijakan-kebijakan yang diambil kepala daerah dalam mewujudkan visi dan misinya.

- Pengentasan kemiskinan

Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi permasalahan utama di Provinsi Papua khususnya di Kabupaten Boven Digoel, maka DPRD Kabupaten Boven Digoel mendorong dan mendukung pemerintah daerah dalam upaya-upaya pengentasan kemiskinan melalui program-programnya terutama menitikberatkan pada pembangunan di kampung-kampung dengan memperhatikan karakteristik dari masing-masing wilayah sehingga tepat sasaran.

- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Tujuan pembangunan ekonomi pada umumnya adalah peningkatan pendapatan riil per kapita serta adanya unsur keadilan atau pemerataan dalam penghasilan dan kesempatan berusaha. Melalui program kunjungan kerja DPRD Kabupaten Boven Digoel yang dilaksanakan secara rutin ke daerah-daerah dengan salah satu tujuannya yaitu untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan yang dimiliki suatu daerah sehingga dapat dirumuskan strategi pengembangan potensi yang ada menjadi lebih terarah dan strategi tersebut akan menjadi bahan masukan kepada pemerintah daerah dan sebagai pedoman pelaksanaan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

- Peningkatan Kapasitas SDM

Untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan efektif, penguatan peran parlemen merupakan salah satu kunci pokok penggerak pembangunan daerah. Kewenangan DPRD dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah membuat DPRD dapat berperan besar dalam pembuatan kebijakan-kebijakan publik, peran DPRD menentukan peraturan daerah, alokasi anggaran dan pelayanan publik agar lebih berpihak kepada masyarakat. Untuk itu sangat penting upaya penguatan kapasitas anggota DPRD agar dapat menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan fungsi-fungsinya dan mempunyai kapasitas yang memadai sehingga efektif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

- Kualitas dan intensitas pelayanan terhadap kegaitan DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai posisi penting dalam menunjang kinerja wakil rakyat mulai dari perencanaan, proses administrasi, pengaturan persiapan, sampai dengan pelaksanaan seluruh agenda kegiatan anggota DPRD yang kerap difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran Meningkatkan fungsi anggaran DPRD, fungsi pengawasan DPRD dan fungsi legislasi DPRD.

## BAB IV

### PENUTUP

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian upaya Sekretariat DPRD dalam kurun waktu Tahun 2018, sehingga upaya Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Sekretariat DPRD, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi kepala daerah yang ingin dicapai pada Tahun 2021.

Akhir kata semoga Renja OPD Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *public service* yang lebih baik.

Tanah Merah, April 2017

**SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL,**

**Drs. INNOCENTIUS TETHOOL**  
Pembina Utama  
NIP. 19581023 199202 1 002

